KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
_

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

	RIAN KEUANGAN RI T JENDERAL PAJAK						H.4 X Final H.5 Tidak Final	
A. IDENTITAS PE	ENERIMA PENGHASIL	AN YANG DIP	OTONG					
A.1 NPWP : 68 807 579 5 722 000								
A.2 NIK :								
A.3 Nama	: LAURENSIA EN	NY P. LIUBAN	IA					
B. PPh PASAL 2	1 YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1 B.2		B.3		B.4	B.5	B.6	B.7	
5 21-402-01		8.310.000		8.310.000	0	5	415.500	
Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 1 1 dd 0 5 mm 2 0 2 0 2 2 yyyy B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB. Nomor : Tanggal dd mm yyyyy B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :								
C.1 NPWP Instansi Pemerintah :			3 3 5 0		0 0 0			
C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUI			AKIT JIWA DAE	RAH ATMA HUSADA MAHAK	KAM PROVINSI I	KALIMANTAN	TIMUR	
C.3 ID Subunit Organisasi :							_	
C.4 Tanggal	:	1 1 dd	0 5 mm	2 0 2 2 yyyy				
C.5 Nama Penai	ndatangan :	RIANDY						
C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan te tandatangani secara elektronik.							benar dan telah saya	
				j berlaku, Direktorat Jenderal Pajal lukan tanda tangan.	k mengatur bahwa	dokumen ini tel	ah ditandatangani secara	

S2BIYTVR